

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, maka Bappeda Kota Palu wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota

2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Palu dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut

1. Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan musrenbang
3. Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam musrenbang
4. Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan
5. Kurangnya pemahaman dalam sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD

Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik analisis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran
2. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bappeda Kota Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Bappeda Kota Palu serta RPJMD Kota Palu tahun 2016-2021. Adapun Indikator kinerja utama Bappeda Kota Palu ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Palu

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Keterangan/penjelasan formulasi
2	3	4
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Pesentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$

Pengertian terpenuhinya aspirasi masyarakat yang dimaksud pada sasaran strategis adalah konsistensi pelaksanaan perencanaan dengan yang termuat dalam dokumen perencanaan agar memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang terdapat dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan di tahun berkenaan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Bappeda Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Perangkat Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Bappeda Kota Palu Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja tingkat Bappeda Kota Palu Tahun 2017 yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
2	3	4
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2017 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi IKU Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Rumus
		3	4	6
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	83,29%	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$

A. Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Skala nilai (%)	Kesimpulan evaluasi
1	85 – 100	Sangat Berhasil
2	70 – 84,99	Berhasil
3	55 – 69,99	Cukup Berhasil
4	< 54,99	Tidak Berhasil

Secara rinci capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Interval (%)			
					< 54,99	55 – 69,99	70 – 84,99	85 – 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	83,29%	83,29%			√	

B. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 untuk sasaran strategis **“Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah”** dengan indikator kinerja utama yaitu persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, angka capaian kinerja sarannya sebesar 83,29% dengan predikat **berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4	5
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	83,29%	83,29%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsistensi antara jumlah program RKPD tahun 2017 sebanyak 319 program sedangkan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan sebanyak 383 program sehingga indikator

kinerja Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD terealisasi sebesar 83,29% atau capaiannya 83,29%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	82,98%	82,98%	83,29%	83,29%

Bersarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017 dapat diketahui indikator kinerja utama Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Tahun 2017 realisasi 83,29% dan capaian 83,29%, mengalami kenaikan sebesar 0,31% dibandingkan pada tahun 2016 dengan realisasi 82,98% dan capaian 82,98%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Renstra 2016-2017

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Target Renstra	Realisasi Tahun 2017	Capaian
1	2	3	4	5	6
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	100%	83,29%	83,29%

Bersarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2016-2021 dapat diketahui indikator kinerja utama Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Tahun 2017 di Renstra ditargetkan 100% dan terealisasi 83,29% dengan capaian 83,29%.

3.1.4 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta Solusinya

Tidak tercapainya indikator kinerja utama persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD disebabkan antara lain :

- a. kurang optimalnya koordinasi perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah,
- b. belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program perangkat daerah
- c. belum optimalnya penyiapan data dan informasi pembangunan kota palu

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi antara lain :

- a. Menerapkan sistim perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis IT
- b. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah
- c. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang akurat dan valid

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efesiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capain target kinerja tahun 2017 dengan realisasi angggaran tahun 2017. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2017. Secara

garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2017 dengan capaian sebesar 83,29%, realisasi anggaran tahun 2017 untuk 5 program dan 26 kegiatan sebesar 4.525.436.900,- atau (97,96%) dari target belanja langsung Bappeda Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah Rp. 4.619.787.050,-, atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.94.350.10,- .

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2017 dengan realisasi capaian target kinerja tahun 2017 pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	83,29%	83,29%	4.619.787.050	4.525.436.900	97,96%

3.1.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Program perencanaan pembangunan daerah				
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Inklusi	46 kelurahan, 8 kecamatan, Musrenbang Kota, dan Musrenbang Inklusi	46 kelurahan, 8 kecamatan, Musrenbang Kota, dan Musrenbang Inklusi	100%
2	Penyusunan Dokumen RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen	100%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Pendampingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
4	Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPMD Kota Palu 2016-2021	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah yang diasistensi	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	100%
6	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Triwulan	4 Triwulan	100%
8	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	4 Triwulan	4 Triwulan	100%
9	Koordinasi Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	Tersusunnya Buku SIPD Kota Palu Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Tersusunnya Laporan Penanggulangan Korupsi Terintegrasi	1 dokumen	1 dokumen	100%

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Bappeda Kota Palu Tahun 2017 menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 4.619.787.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.525.436.900,- atau 97,96% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017

Uraian	Pagu 2017	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG	4.619.787.050	4.525.436.900	97,96%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.462.664.550	1.436.134.731	98,19%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000	2.018.976	28,04%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	222.051.400	221.372.700	99,69%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	602.230.000	583.655.000	96,92%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.717.800	2.717.800	100,00%
Penyediaan alat tulis kantor	71.702.550	71.702.550	100,00%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.076.250	15.076.250	100,00%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	468.000	468.000	100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	129.450.000	128.640.000	99,37%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.400.000	8.150.000	86,70%
Penyediaan makanan dan minuman	40.640.000	40.640.000	100,00%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	361.728.550	361.693.455	99,99%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398.187.500	398.187.500	100,00%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	370.000.000	370.000.000	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	28.187.500	28.187.500	100,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.325.000	41.975.000	99,17%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.325.000	41.975.000	99,17%
Program perencanaan pengembangan kota-kota	359.921.000	355.092.657	98,66%

Uraian	Pagu 2017	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1	2	3	4
menengah dan besar			
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	358.121.000	353.292.657	98,65%
Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau	1.800.000	1.800.000	100,00%
Program perencanaan pembangunan daerah	2.356.689.000	2.294.047.012	97,34%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	28.630.000	28.630.000	100,00%
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	66.761.500	66.761.500	100,00%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	405.942.500	380.847.866	93,82%
Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	144.078.000	132.763.703	92,15%
Penyusunan Dokumen RKPD	188.839.000	185.806.628	98,39%
Pendampingan Pembangunan Daerah	1.008.300.000	988.300.000	98,02%
Koordinasi Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	297.039.000	297.039.000	100,00%
Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	85.680.000	82.742.215	96,57%
Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	77.139.000	77.139.000	100,00%
Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	54.280.000	54.017.100	99,52%

3.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Bappeda Kota Palu Tahun 2017 mendapat anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.323.574.920,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.287.842.484,- atau 98,46 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

Uraian	Pagu 2017	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1	2	3	4
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.323.574.920	2.287.842.484	98,46%
Belanja Pegawai	2.323.574.920	2.287.842.484	98,46%
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.087.374.920	2.057.342.484	98,56%
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.667.434.512	1.645.906.174	98,71%
Tunjangan Keluarga	107.687.388	106.062.696	98,49%
Tunjangan Jabatan	180.005.004	176.145.000	97,86%
Tunjangan Fungsional Umum	50.834.988	50.630.000	99,60%
Tunjangan Beras	79.837.620	77.054.880	96,51%
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.548.228	1.523.225	98,39%
Pembulatan Gaji	27.180	20.509	75,46%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	236.200.000	230.500.000	97,59%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	236.200.000	230.500.000	97,59%

**BAB IV
PENUTUP**

Hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Palu Tahun 2017 terhadap indikator kinerja utama yaitu Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD meunjukkan capaian kinerja sebesar 83,29% atau dengan kinerja berhasil.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2017, Bappeda Kota Palu harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Bappeda Kota Palu benar menunjukkan indikator kinerja utama Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD indikator kinerja utama Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD indikator kinerja utama Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD sebuah lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistim Informasi *E-Planning, E-Sakip, E, Monev* dan *E-Data Base*, guna meningkatkan peran Bappeda Kota Palu dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah.
2. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah
3. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang akurat dan valid